

ASPEK HUKUM EKONOMI *dan* BISNIS

Editor:

Shidarta

Abdul Rasyid

Ahmad Sofian



DAFTAR ISI

DAFTAR SINGKATAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi

1

PEMAHAMAN SEKILAS TENTANG SISTEM HUKUM INDONESIA	1
--	---

–Shidarta–

A. Pengertian tentang Hukum	1
B. Pengertian Sistem Hukum	2
C. Latar Belakang Sejarah Sistem Hukum Indonesia	6
D. Sumber Materiel Hukum Indonesia	12
E. Sumber Formal Hukum Indonesia	17
F. Hukum Bisnis	23
G. Penutup	26
DAFTAR PUSTAKA	28

2

HUKUM BENDA	31
-------------	----

–Siti Yuniarti–

A. Pendahuluan	31
B. Sistematika Hukum Benda	33
C. Jenis Benda	33
1. <i>Bezit</i> (Kedudukan Berkuasa)	35
2. <i>Levering</i> (Penyerahan)	36
3. <i>Verjaring</i> (Kedaluwarsa/Lewat Waktu)	36
4. <i>Bezwaring</i> (Pembebasan/Jaminan)	36
D. Asas-asas dalam Hukum Benda	36
E. Hak Kebendaan	37
F. Hak Kebendaan yang Memberikan Kenikmatan	38
G. Hak Kebendaan yang Memberikan Jaminan	39
1. Gadai	40
2. Hipotek	41

3. Hak Tanggungan	41
4. Fidusia	42
5. Jaminan Resi Gudang	42
H. Penutup	43
DAFTAR PUSTAKA	45

3

HUKUM PERJANJIAN 47

–Erni Herawati–

A. Pendahuluan	47
B. Pengertian Perjanjian	47
C. Asas-Asas Perjanjian	49
1. Asas Konsensualisme	49
2. Asas Kebebasan Berkontrak	50
3. Asas <i>Pacta Sunt Servanda</i> /Kekuatan Mengikat Suatu Kontrak...50	
4. Asas Iktikad baik	50
D. Syarat Sah Perjanjian	51
E. Perikatan	56
F. Prestasi dan Wanprestasi	57
G. Hapusnya Perikatan	59
DAFTAR PUSTAKA	60

4

HUKUM PERUSAHAAN 61

–Erni Herawati–

A. Pendahuluan	61
B. Jenis Perusahaan	62
1. Usaha Perorangan	64
2. Perusahaan Bukan Badan Hukum	65
a. Persekutuan Perdata (<i>Maatschap</i>)	65
b. Firma	66
c. Perseroan Komanditer (<i>Commanditaire Vennootschap/CV</i>)	67
3. Perusahaan berbadan hukum: Perseroan Terbatas (PT)	69
a. Definisi Perseroan Terbatas	69
b. Syarat-syarat Pendirian Perseroan Terbatas	70
c. Organ Perseroan Terbatas	71
C. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan	74
DAFTAR PUSTAKA	76

5

HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL

77

-Besar-

A. Pengertian	77
B. Dasar Hukum	78
C. Jenis-jenis Kekayaan Intelektual	78
D. Hak Cipta	80
1. Pengertian Hak Cipta	80
2. Dasar Hukum Hak Cipta	81
3. Objek Hak Cipta	81
4. Batasan Terhadap Pemberian Hak Cipta	82
5. Perlindungan Hukum Hak Cipta	84
6. Prosedur Pendaftaran Hak Cipta	84
E. Paten	85
1. Pengertian Paten	85
2. Objek Hak Paten	86
3. Perlindungan Hukum Bagi Hak Paten	86
4. Prosedur Permohonan Pendaftaran Paten	87
F. Merek	87
1. Pengertian Hak Merek	87
2. Batasan Terhadap Merek	88
3. Permohonan Merek yang ditolak	88
4. Perlindungan Hukum Merek	89
5. Prosedur atau Tata Cara Pendaftaran Merek	89
G. Desain Industri	90
1. Pengertian Desain Industri	90
2. Lingkup Desain Industri	90
3. Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri	91
4. Pendaftaran Desain Industri	91
F. Rahasia Dagang	92
1. Pengertian Rahasia Dagang	92
2. Lingkup Rahasia Dagang	92
3. Perlindungan Hukum Rahasia Dagang	92

6

HUKUM KETENAGAKERJAAN

95

-Erna Ratnaningsih dan Iron Sarira-

A. Pengantar	95
B. Pengertian dan Kedudukan Hukum Ketenagakerjaan	96
1. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan	96

2. Kedudukan Hukum Ketenagakerjaan	98
a. Hukum Ketenagakerjaan ditinjau dari Hukum Perdata	99
b. Hukum Ketenagakerjaan Ditinjau dari Hukum Pidana	101
c. Hukum Ketenagakerjaan Ditinjau dari Hukum Tata Usaha Negara	103
C. Hukum Positif di Bidang Ketenagakerjaan.....	105
1. Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan Tentang Ketenagakerjaan.....	105
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Hukum Ketenagakerjaan.....	106
D. Syarat Kerja dan Perjanjian Kerja dalam Hubungan Kerja	108
1. Syarat Kerja (Mikro Kondisional)	108
a. Unsur Adanya Pekerjaan	109
b. Unsur Adanya Upah.....	109
c. Unsur Adanya Perintah.....	110
d. Unsur Adanya Waktu Tertentu	110
2. Perjanjian Kerja	111
E. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	113
1. Hubungan Industrial dan Perselisihan Hubungan Industrial	113
2. Pemutusan Hubungan Kerja dan Larangan PHK.....	116
a. Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pengusaha/Majikan ...	116
b. Pemutusan Hubungan Kerja oleh Buruh	116
c. Pemutusan Hubungan Kerja Demi Hukum.....	117
d. Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pengadilan.....	117
3. Hak Buruh Setelah PHK.....	119
4. Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan/Perburuhan	121
a. Penyelesaian Perselisihan di Luar Pengadilan.....	122
b. Penyelesaian Perselisihan Melalui Pengadilan.....	124
DAFTAR PUSTAKA	126

7

HUKUM PASAR MODAL

127

—Agus Ryanto—

A. Latar Belakang	127
B. Dasar Hukum Pasar Modal.....	128
C. Hukum Pasar Modal dan Instrumennya di Pasar Modal.....	131
1. Apakah Hukum Pasar Modal itu?	131
2. Instrumen Pasar Modal	132
3. Kelembagaan di Pasar Modal Indonesia.....	133

a. Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	134
b. Bursa Efek Indonesia (BEI)	134
E. Penawaran Umum dan Pencatatan Saham di BEI	135
1. Penawaran Umum	136
a. Tahap Pra-Emisi	137
b. Tahap Emisi	138
c. Tahap Pasca Emisi.....	138
2. Pencatatan Saham di BEI	139
F. Menjadi Perusahaan Publik Dengan Keterbukaan Informasi	142
G. Aksi Korporasi (<i>Corporate Action</i>)	146
H. Penegakan Hukum di Pasar Modal	147
1. Kejahatan di Pasar Modal	148
a. Informasi yang Menyesatkan (<i>Misleading Information</i>) ...	148
b. Penipuan (<i>Fraud</i>)	149
c. Manipulasi Pasar (<i>Market Manipulation</i>)	150
d. Perdagangan Orang Dalam (<i>Insider Trading</i>)	151
2. Pelanggaran di Pasar Modal	151

8

HUKUM PERSAINGAN USAHA 155

–Shidarta–

A. Pendahuluan	155
B. Filosofi UU No. 5 Tahun 1999.....	156
C. Pendekatan <i>Per Se Illegal</i> dan <i>Rule of Reason</i>	158
D. Anatomi UU No. 5 Tahun 1999.....	160
E. Sanksi.....	165
F. Lembaga KPPU	166
G. Prosedur Beracara di KPPU	167
H. Penutup	175
DAFTAR PUSTAKA	176

9

HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN 177

–Shidarta–

A. Pengantar	177
B. Subjek-subjek Hukum Perlindungan Konsumen	177
1. Konsumen dan Kelompok Konsumen	177
2. Pelaku Usaha	180
3. Asosiasi Pelaku Usaha	182

4. Kementerian Perdagangan.....	184
5. Badan Perlindungan Konsumen Nasional	185
6. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat	188
7. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	189
8. Peradilan	191
C. Pemetaan.....	194
D. Prinsip-prinsip Hukum Perlindungan Konsumen	196
1. Kontrak Bukan Syarat	196
2. Small Claim.....	196
3. Gugatan Perwakilan Kelompok	197
4. Gugatan LPKSM	197
5. Tanggung Jawab dengan Beban Pembuktian Terbalik	198
E. Isu Penting dalam Perlindungan Konsumen	198
F. Penutup	199
DAFTAR PUSTAKA	200

10

HUKUM KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

201

–Nirmala Many–

A. Pendahuluan.....	201
B. Sejarah Hukum Kepailitan	202
C. Definisi Kepailitan	204
D. Tujuan UUKPKPU	205
E. Asas-asas Kepailitan	206
F. Prosedur Kepailitan	206
G. Akibat Putusan Pailit	213
H. Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit.....	214
I. Berakhirnya Kepailitan.....	214
J. Peran Pengadilan Niaga	214
K. Perjanjian Internasional tentang Kepailitan	215
L. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	216
1. Pengertian dan Perbedaan antara PKPU dan Kepailitan	216
2. Jenis-jenis PKPU	217
a. PKPU Sementara	217
b. PKPU Tetap.....	217
3. Hakim Pengawas dan Pengurus	218
4. Panitia Kreditur	218
5. Status Sita dan Eksekusi Jaminan	218
6. Pembayaran Utang Selama Berlangsungnya PKPU.....	218

7. Kompensasi Utang dalam PKPU	219
8. Akibat Permohonan PKPU Tetap Ditolak	219
9. Berakhirnya PKPU	219
M. Penutup	219
DAFTAR PUSTAKA	221

11

HUKUM PAJAK 223

–Richard Burton–

A. Pengantar	223
B. Pajak untuk Keadilan	226
C. Penegakan Hukum Pajak	228
D. Subjek Pajak dan Objek Pajak	230
E. Upaya Hukum Wajib Pajak	234
F. Sekilas Kasus Hukum Pajak	236
DAFTAR PUSTAKA	238

12

PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI LUAR PENGADILAN 239

–Abdul Rasyid–

A. Pendahuluan	239
B. Sejarah Singkat Penyelesaian Sengketa	240
C. Definisi Alternatif Penyelesaian Sengketa	241
D. Model Alternatif Penyelesaian Sengketa	244
1. Negosiasi	244
2. Mediasi	246
3. Arbitrase	250
DAFTAR PUSTAKA	253

13

TINDAK PIDANA BISNIS 255

–Ahmad Sofian–

A. Pendahuluan	255
B. Tindak Pidana Perpajakan	257
C. Tindak Pidana Korupsi	267
D. Tindak Pidana Pencucian Uang	269
E. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	273
1. Kejahatan Korporasi	273
2. Pelanggaran HAM oleh Korporasi	275

3. Instrumen Hukum Pelanggaran HAM	278
4. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	279
DAFTAR PUSTAKA	281

14

HUKUM SIBER	285
<i>–Bambang Pratama–</i>	
A. Tinjauan Umum	285
B. Ruang Lingkup Hukum Siber di Indonesia	289
C. UU-ITE dan Cakupannya.....	290
1. Konsep Kepemilikan dalam Ruang Siber.....	292
2. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual pada UU-ITE	293
3. Pengaturan Persaingan Usaha pada UU-ITE	294
4. Pengaturan Perlindungan Konsumen pada UU-ITE	295
D. Sumbangan Pemikiran Untuk UU-ITE ke Depan.....	297
E. Penutup	299
DAFTAR PUSTAKA	299

15

ETIKA BISNIS	303
<i>–Shidarta–</i>	
A. Pendahuluan.....	303
B. Nilai, Asas, dan Norma.....	304
C. Pembentukan “Autonomic Legislation”	307
D. Etika Bisnis sebagai “Autonomic Legislation”	311
E. Penutup	317
DAFTAR PUSTAKA	317

16

IMPLIKASI ETIS DALAM BISNIS:	
DALAM KONTEKS HUKUM PARIWISATA	319
<i>–Ahmad Sofian–</i>	
A. Pendahuluan	319
B. Pengertian Pariwisata Seks Anak.....	320
C. Situasi Global Pariwisata Seks Anak.....	322
D. Pelaku Kejahatan Seks Anak	325
1. Wisatawan Seks Anak Situasional <i>(Situational Sex Offender)</i>	326

2. Wisatawan Seks Anak Preferensial
 (*Preferential Sex Offenders*).....326

3. Pedofil (*Pedophile*)326

E. Instrumen Hukum Internasional tentang Pariwisata Seks Anak...327

F. Perundang-Undangan Nasional336

DAFTAR PUSTAKA340

GLOSARIUM 343

PARA PENULIS 365